

Optimalisasi Pembinaan Kemandirian Bakery Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung

M. Naufaldo Gussandrino¹, Mitro Subroto²

¹Politeknik Pengayoman Indonesia, Jurusan Ilmu Pemasyarakatan

²Politeknik Pengayoman Indonesia, Jurusan Ilmu Pemasyarakatan

E-mail: mnaufaldogussandrino@gmail.com¹, subrotomitro07@gmail.com²

Article History:

Received: 06 September 2025

Revised: 29 Oktober 2025

Accepted: 18 November 2025

Keywords: Lapas, pembinaan kemandirian, narapidana, bakery, reintegrasi sosial, optimalisasi

Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan serta mengidentifikasi hambatan optimalisasi program pembinaan bakery di Lapas Kelas I Bandar Lampung. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan teori optimalisasi dan teori pembelajaran sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Raja Bakery berhasil meningkatkan keterampilan teknis, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab narapidana. Namun, terdapat kendala berupa keterbatasan sarana prasarana, minimnya instruktur bersertifikasi, ketergantungan pada pesanan produksi, belum adanya outlet pemasaran permanen, serta lemahnya dukungan pasca-pelatihan seperti akses modal dan jaringan usaha. Aspek komunikasi dan keterlibatan stakeholder eksternal juga masih terbatas. Rekomendasi penelitian mencakup penguatan kapasitas SDM, penyusunan SOP teknis, pembangunan kemitraan dengan dunia usaha, pembukaan outlet tetap, serta komunikasi yang lebih inklusif. Temuan ini menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor guna menciptakan pembinaan kemandirian yang berkelanjutan..

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Lebih dari sekadar tempat pembinaan bagi narapidana, Lapas memiliki peran krusial dalam mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, pembinaan kemandirian menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan reintegrasi sosial setelah masa hukuman berakhir (Untari & Choirullah, 2023).

Lapas Kelas I Bandar Lampung dengan tingkat hunian yang tinggi menghadapi tantangan dalam melaksanakan program pembinaan, salah satunya melalui pelatihan keterampilan bakery. Program ini tidak hanya berfokus pada penguasaan teknis pembuatan roti dan kue, tetapi juga menanamkan nilai kewirausahaan, disiplin, serta tanggung jawab sebagai bekal kemandirian.

Pelatihan dirancang secara komprehensif, mulai dari teknik dasar hingga mahir, penggunaan peralatan modern, hingga pengolahan bahan berkualitas. Selain itu, narapidana juga dibekali pengetahuan manajemen usaha, meliputi perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, dan pemahaman regulasi usaha makanan. Dengan demikian, program bakery diharapkan dapat memberdayakan narapidana secara ekonomi sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi reintegrasi sosial secara lebih mandiri setelah bebas (Rachmayani, 2015).

Praktik kerja terintegrasi dalam program bakery di Lapas memberikan pengalaman langsung kepada narapidana dalam lingkungan produksi nyata, sehingga mereka dapat mengasah keterampilan sekaligus membangun kepercayaan diri. Dukungan pasca-pembebasan berupa inkubasi bisnis dan pendampingan juga menjadi jembatan penting untuk membantu narapidana memulai usaha sendiri, dengan harapan mampu mengurangi tingkat residivisme dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik di masyarakat. Meski dihadapkan pada keterbatasan sarana prasarana, kebutuhan kurikulum yang relevan, serta minimnya instruktur kompeten, program ini tetap memiliki potensi besar dalam menciptakan individu yang produktif, mandiri, dan berkontribusi positif (Saputra et al., 2025). Saat ini terdapat 8 narapidana yang mengikuti pembinaan bakery, dengan harapan tidak hanya meningkatkan keterampilan mereka, tetapi juga dapat menularkan pengetahuan kepada sesama warga binaan. Secara lebih luas, pembinaan kemandirian di Lapas bertujuan membekali narapidana dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar kerja sehingga meningkatkan peluang kerja pasca-bebas, menekan tingkat residivisme, serta menumbuhkan rasa percaya diri melalui keberhasilan menghasilkan produk berkualitas (Putri et al., 2023).

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran penting dalam mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat melalui program pembinaan kemandirian, salah satunya di bidang bakery yang menjadi fokus utama di Lapas Kelas I Bandar Lampung. Program ini bertujuan membekali narapidana dengan keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah bebas, namun efektivitasnya masih memerlukan optimalisasi. Kualitas pelatihan harus dievaluasi secara berkala agar relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang, sementara ketersediaan sarana dan prasarana memadai menjadi faktor penentu peningkatan mutu pembelajaran. Selain itu, keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh dukungan pasca-pelatihan berupa akses modal, pendampingan, dan jaringan pemasaran agar narapidana mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh serta membangun usaha mandiri setelah bebas. Tanpa dukungan tersebut, keterampilan yang diberikan berisiko tidak berkembang optimal sehingga tujuan reintegrasi sosial sulit tercapai.

Program pembinaan bakery di Lapas Kelas I Bandar Lampung masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia karena belum adanya petugas bersertifikat, pemasaran yang masih terbatas hanya melalui WhatsApp, hingga pelatihan yang hanya dilakukan ketika ada pesanan sehingga mengurangi intensitas praktik narapidana. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pembinaan dan menuntut adanya optimalisasi melalui langkah strategis, seperti peningkatan sarana prasarana dengan peralatan modern, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri, serta perluasan jaringan pemasaran melalui kerja sama dengan pihak swasta maupun pemerintah. Selain itu, dukungan berupa akses modal usaha, pendampingan berkelanjutan dari praktisi bakery, dan kemitraan dengan instansi terkait seperti Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi, dan pelaku industri juga sangat penting untuk membangun ekosistem pembinaan yang berkelanjutan. Dengan penerapan strategi tersebut, program bakery diharapkan tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis narapidana, tetapi juga menumbuhkan kemandirian ekonomi, mengurangi residivisme, serta memperkuat proses reintegrasi sosial

setelah bebas (Putri et al., 2023).

Tantangan dalam pembinaan bakery di Lapas Kelas I Bandar Lampung dapat dianalisis melalui pendekatan sosiologis dan Teori Pembelajaran Sosial. Dari perspektif sosiologis, narapidana kerap menghadapi stigma sosial baik dari masyarakat luas maupun dari sesama narapidana, yang menghambat motivasi mereka untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Stigma ini melahirkan rasa rendah diri dan kurangnya kepercayaan diri untuk berpartisipasi aktif dalam program pembinaan (Maghfiroh & Lewoleba, 2024). Selain itu, kondisi sosial di dalam Lapas yang padat dan rawan konflik sering kali menimbulkan tekanan psikologis yang mengganggu proses pembelajaran. Dalam konteks Teori Pembelajaran Sosial, situasi ini dapat menghambat proses observasi dan imitasi, karena narapidana kesulitan fokus pada materi ketika merasa tertekan atau tidak aman. Hambatan juga muncul dari luar Lapas, di mana kurangnya dukungan keluarga maupun jaringan sosial membuat narapidana merasa terisolasi dan kurang termotivasi untuk mengembangkan keterampilan yang bermanfaat setelah bebas.

Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti peralatan bakery yang belum memadai serta bahan baku yang terbatas, semakin memperberat hambatan dalam pelaksanaan program pembinaan (Rachmayani, 2015). Dengan demikian, tantangan dalam pembinaan bakery bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek sosial dan psikologis yang memengaruhi efektivitas program. Melalui pendekatan sosiologis dan Teori Pembelajaran Sosial, dapat dipahami bagaimana faktor internal dan eksternal saling berinteraksi dalam menentukan keberhasilan pembinaan. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian berjudul *“Optimalisasi Pembinaan Kemandirian Bakery bagi Narapidana di Lapas Kelas I Bandar Lampung”* guna memperoleh hasil yang lebih spesifik di Unit Pelaksana Teknis terkait.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada upaya mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, serta aktivitas sosial yang berkaitan dengan pembinaan kemandirian narapidana di Lapas Kelas I Bandar Lampung. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, seperti Kepala Seksi Bimbingan Kerja, staf pembinaan, dan narapidana peserta program bakery, serta observasi langsung terhadap kegiatan pembinaan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan tahunan, regulasi yang berlaku, dan literatur pendukung. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan, observasi partisipatif maupun non-partisipatif, serta wawancara semi terstruktur untuk menggali informasi secara mendalam dan akurat.

Analisis data dilakukan secara sistematis melalui tahapan pengumpulan, penyusunan, pengkajian, serta penarikan kesimpulan berdasarkan data yang relevan. Langkah penelitian meliputi tahap persiapan (penetapan fokus dan perizinan penelitian), pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumentasi), analisis data (reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan), dan pelaporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi. Dengan rancangan penelitian yang terstruktur ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan program pembinaan kemandirian, khususnya pelatihan bakery, sehingga narapidana memperoleh bekal keterampilan yang bermanfaat untuk reintegrasi sosial dan mengurangi risiko residivisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Program Pembinaan Kemandirian Bakery di Lapas Kelas I Bandar Lampung

1. Penentuan Tujuan (Maksimisasi dan Efisiensi Hasil)

Tujuan utama dari program pembinaan kemandirian bakery di Lapas Kelas I Bandar Lampung adalah membekali narapidana dengan keterampilan aplikatif di bidang produksi roti. Program ini tidak hanya menekankan pada penguasaan aspek teknis, tetapi juga diarahkan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kesiapan ekonomi narapidana setelah bebas. Dengan demikian, narapidana tidak hanya dipandang sebagai individu yang sedang menjalani hukuman, tetapi juga sebagai subjek yang perlu dipersiapkan secara serius untuk proses reintegrasi sosial dan ekonomi di masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pernyataan staf bimbingan kerja yang menyebutkan bahwa tujuan utama program adalah memberikan modal keterampilan yang dapat dikembangkan narapidana setelah bebas. Pandangan ini menegaskan bahwa program bakery memiliki orientasi jangka panjang dengan menekankan pada kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip maksimisasi manfaat yang dijelaskan oleh Sidik (2002), di mana penetapan tujuan menjadi titik awal yang menentukan arah, prioritas, serta parameter keberhasilan dalam pelaksanaan optimalisasi, baik dalam keterampilan, efisiensi, maupun hasil nyata.

Tujuan yang ditetapkan pihak lapas telah memenuhi dimensi konseptual karena berorientasi pada output keterampilan dan outcome kemandirian narapidana. Kejelasan tujuan ini menunjukkan bahwa program bakery bukan sekadar kegiatan pembinaan rutin, tetapi merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada transformasi sosial dan ekonomi. Dengan keterampilan yang dapat diterapkan langsung di pasar kerja, program bakery berfungsi sebagai instrumen pembinaan sekaligus rekonstruksi masa depan narapidana, yang pada akhirnya diharapkan mampu mengurangi angka residivisme secara sistemik.

2. Alternatif Keputusan

Indikator kedua dalam teori optimalisasi menurut Sidik (2002) adalah alternatif keputusan, yang menekankan pentingnya berbagai pilihan rasional dalam mencapai tujuan pembinaan. Dalam program kemandirian bakery di Lapas Kelas I Bandar Lampung, penerapan asesmen awal terhadap narapidana menjadi strategi utama untuk menentukan jalur pembinaan yang tepat. Asesmen ini membantu mengenali minat, bakat, dan kemampuan dasar narapidana, sehingga mereka dapat ditempatkan pada program yang sesuai, termasuk pelatihan bakery. Dengan pendekatan berbasis data ini, keputusan yang diambil tidak bersifat serampangan atau sekadar administratif, melainkan didasarkan pada evidence-based decision making yang lebih efisien dan relevan.

Penerapan asesmen terbukti memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas program. Ketika narapidana ditempatkan sesuai minat dan kemampuannya, muncul motivasi, keterlibatan aktif, serta komitmen lebih tinggi dalam menjalani pelatihan. Hal ini memperkuat prinsip individualized treatment plan dalam sistem pemasyarakatan modern, di mana setiap narapidana diperlakukan sebagai individu dengan potensi dan kebutuhan yang berbeda. Kepala Seksi Bimbingan Kerja menegaskan hal ini dalam wawancaranya bahwa asesmen menjadi dasar untuk mengarahkan narapidana ke kegiatan yang sesuai, seperti bakery. Pendekatan ini sekaligus mendukung Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya pembinaan berbasis asesmen risiko dan kebutuhan.

Selain meningkatkan efektivitas, mekanisme alternatif keputusan ini juga mencerminkan penghormatan terhadap otonomi narapidana, karena mereka diberikan kesempatan untuk memilih program sesuai minat, seperti konveksi, sulam tapis, barbershop, pengelasan, maupun bakery. Dengan adanya pilihan yang rasional dan relevan, proses optimalisasi tidak hanya meningkatkan produktivitas program, tetapi juga mengurangi risiko kegagalan akibat ketidaksesuaian peserta. Hal ini dapat dipandang sebagai praktik baik dalam manajemen pembinaan, karena menyalurkan sumber daya secara tepat, meningkatkan keberhasilan pelatihan, dan memperkuat kesiapan narapidana untuk reintegrasi sosial secara berkelanjutan.

3. Pengelolaan Sumber Daya yang Terbatas

Indikator ketiga dalam teori optimalisasi menurut Sidik (2002) adalah keterbatasan sumber daya, yang meliputi tenaga kerja, waktu, dana, serta sarana dan prasarana. Justru karena adanya keterbatasan inilah proses optimalisasi menjadi penting, agar tujuan pembinaan tetap tercapai melalui penggunaan sumber daya yang efisien dan terarah. Dalam konteks pembinaan bakery di Lapas Kelas I Bandar Lampung, keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan nyata yang memengaruhi keberlangsungan dan efektivitas program.

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia profesional, khususnya instruktur yang memiliki kompetensi formal di bidang bakery. Saat ini, sebagian besar pelatihan diberikan oleh petugas internal yang belajar secara otodidak, sementara instruktur dari luar hanya sesekali dihadirkan tanpa jadwal yang konsisten. Kondisi ini membuat kualitas pelatihan belum sepenuhnya terstandarisasi, meskipun motivasi petugas dan partisipasi narapidana tetap tinggi. Selain itu, keterbatasan juga terlihat pada aspek anggaran dan infrastruktur, terutama dalam hal fasilitas produksi serta pemasaran.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemasaran produk roti masih mengandalkan media sosial dan event tertentu karena belum tersedianya outlet permanen untuk distribusi. Ketidadaan sarana promosi dan jaringan pemasaran yang memadai menjadi penghambat dalam memperluas jangkauan usaha bakery, meskipun kualitas produk sudah diterima masyarakat. Situasi ini menggambarkan bahwa keterbatasan sumber daya bukan hanya masalah teknis, tetapi juga tantangan strategis yang membutuhkan inovasi, kolaborasi dengan pihak luar, serta perencanaan yang lebih adaptif agar program tidak mengalami stagnasi dan tetap berkontribusi pada tujuan reintegrasi sosial narapidana.

4. Komunikasi, Sumber Daya, dan Disposisi

Menurut Handayani et al. (2023), keberhasilan suatu proses optimalisasi tidak hanya ditentukan oleh kejelasan tujuan dan alternatif keputusan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tiga faktor pendukung utama, yaitu komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Ketiga aspek ini berfungsi sebagai pilar struktural yang menentukan sejauh mana program dapat dijalankan secara efektif dalam konteks implementasi nyata. Dalam program Raja Bakery di Lapas Kelas I Bandar Lampung, ketiga faktor tersebut dapat diamati secara langsung dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana, meskipun masih ditemukan sejumlah hambatan yang bersifat struktural.

Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi dilakukan secara langsung dan personal melalui interaksi harian antara petugas Bimbingan Kerja dan narapidana. Informasi tentang tujuan, prosedur, dan manfaat program tidak hanya diberikan dalam sosialisasi awal, tetapi juga diperkuat dengan pendampingan informal yang berkelanjutan. Model komunikasi

ini dinilai efektif dalam membangun kedekatan emosional dan kepercayaan, meskipun belum sepenuhnya menjangkau semua peserta, khususnya narapidana baru yang masih pasif. Di sisi lain, aspek sumber daya masih menghadapi keterbatasan signifikan, terutama dalam hal ketersediaan instruktur profesional dan dukungan anggaran. Peralatan produksi memang tersedia, namun ketidakseimbangan dengan keterbatasan SDM menghambat konsistensi kualitas pelatihan. Minimnya anggaran juga berdampak pada terbatasnya ruang inovasi, promosi produk, maupun pelatihan lanjutan, sehingga program cenderung berjalan pada tingkat dasar.

Faktor disposisi atau komitmen pelaksana program menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung keberlangsungan Raja Bakery. Petugas Bimbingan Kerja tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendamping aktif yang menanamkan kedisiplinan, etika kerja, dan motivasi kepada narapidana. Komitmen ini terbukti dari keterlibatan mereka dalam proses sehari-hari, mulai dari memantau produksi hingga memberikan arahan dan evaluasi. Pernyataan staf Bimker, “Kita bukan hanya awasi, tapi juga bimbing. Kita jadi jembatan di situ” (Wawancara, 16 April 2025), menegaskan bahwa dedikasi petugas merupakan modal penting bagi kontinuitas program. Dengan demikian, meskipun komunikasi sudah bersifat humanis dan disposisi pelaksana sangat kuat, keterbatasan sumber daya masih menjadi titik lemah yang menghambat tercapainya kondisi optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan SDM, pengelolaan sumber daya yang lebih terarah, serta peningkatan komunikasi partisipatif agar program benar-benar mencapai efektivitas maksimal.

B. Program Bakery sebagai Instrumen Reintegrasi Sosial

Program pembinaan kemandirian bakery di Lapas Kelas I Bandar Lampung dapat dianalisis dalam kerangka reintegrasi sosial, yang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemasyarakatan modern. Reintegrasi sosial menekankan pemulihan hubungan narapidana dengan tiga aspek fundamental kehidupan, yaitu hidup (fungsi personal dan aktivitas sehari-hari), kehidupan (relasi sosial), dan penghidupan (kemampuan ekonomi). Tujuan utama dari konsep ini bukan hanya mengembalikan narapidana ke masyarakat, melainkan juga memastikan mereka mampu hidup secara bermartabat, produktif, dan terhindar dari risiko residivisme setelah bebas. Dalam praktiknya, program Raja Bakery berfungsi sebagai instrumen pembinaan yang bersifat produktif dan transformatif. Narapidana tidak sekadar dilibatkan dalam kegiatan kerja, tetapi juga diperkenalkan pada etika produksi, keterampilan wirausaha, serta budaya kerja yang terstruktur. Proses ini mendorong perubahan pola pikir, peningkatan keterampilan teknis, sekaligus pemulihan harga diri. Hal tersebut sejalan dengan prinsip asimilasi progresif, yakni menghubungkan aktivitas intramural di dalam lapas dengan tuntutan dan dinamika dunia luar, sehingga narapidana dipersiapkan untuk menghadapi realitas sosial yang lebih luas.

Manfaat program juga tercermin dari testimoni narapidana peserta program, seperti Anjas yang menyatakan: “Di sini saya belajar bikin roti, paham bahan-bahannya, dan kalau keluar saya ingin kembangkan lagi” (Wawancara, 16 April 2025). Ungkapan ini menunjukkan bahwa program bakery tidak hanya memberi kesibukan selama masa pidana, tetapi juga menumbuhkan orientasi masa depan yang positif. Narapidana mulai menyadari potensi dirinya dan memiliki motivasi untuk membangun kehidupan yang lebih baik melalui keterampilan sah yang diperoleh, sehingga reintegrasi sosial bukan hanya sebatas wacana

administratif, melainkan terinternalisasi dalam sikap, kesiapan mental, dan keterampilan praktis.

Secara teoritis, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa reintegrasi sosial merupakan proses pembaruan nilai dan norma agar individu mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat setelah mengalami perubahan status sosial. Sementara Ogburn dan Nimkoff menekankan bahwa integrasi sosial baru tercapai jika individu mampu memenuhi kebutuhan sosial serta konsisten menjalankan nilai dan norma dalam masyarakat. Dalam konteks ini, program bakery menjadi media pembiasaan nilai kerja, kedisiplinan, dan kemandirian yang menjembatani transisi narapidana menuju masyarakat. Dengan demikian, pembinaan bakery tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat posisi narapidana sebagai individu yang siap menjalani reintegrasi sosial secara utuh, mandiri, dan bermartabat.

C. Hambatan Optimalisasi dalam Perspektif Teoretis

Dari perspektif teori optimalisasi Sidik (2002), keberhasilan suatu proses optimalisasi ditentukan oleh keseimbangan antara tujuan, alternatif keputusan, serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Dalam program pembinaan kemandirian bakery di Lapas Kelas I Bandar Lampung, hambatan struktural dan teknis yang masih ada menunjukkan bahwa program ini belum mencapai performa ideal, melainkan masih berada dalam fase transisi menuju optimalisasi penuh. Salah satu hambatan paling mendasar adalah ketiadaan outlet pemasaran tetap di luar lapas, yang membatasi distribusi produk dan melemahkan potensi integrasi hasil kerja narapidana ke dalam ekosistem ekonomi masyarakat. Pemasaran yang bergantung pada media sosial atau event insidental tidak mampu menciptakan pasar stabil, sehingga tujuan utama berupa kemandirian ekonomi pasca-pidana belum tercapai sepenuhnya.

Selain hambatan pemasaran, ketiadaan kerja sama strategis dengan pihak eksternal juga memperlihatkan lemahnya integrasi lintas sektor dalam mendukung program. Padahal, kemitraan dengan industri bakery, UMKM, koperasi, atau dinas terkait dapat menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan program. Tanpa adanya mitra, peluang inovasi produk, peningkatan teknologi, dan perluasan jejaring distribusi menjadi sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan masih berperan sebatas pelatih keterampilan dasar, belum berfungsi sebagai penghubung antara warga binaan dengan dunia usaha. Akibatnya, keterampilan yang diperoleh narapidana berisiko kehilangan relevansi ketika dihadapkan pada persaingan nyata di luar lembaga. Hambatan lain juga muncul dari keterbatasan pelatihan profesional yang sebagian besar hanya mengandalkan pengalaman petugas internal. Tanpa dukungan tenaga ahli atau instruktur bersertifikat, keterampilan yang diperoleh narapidana cenderung repetitif dan kurang berkembang secara teknis. Situasi ini menimbulkan paradoks: fasilitas produksi sudah memadai, tetapi kapasitas SDM pelatih tidak sejalan dengan kebutuhan peningkatan kualitas program. Akibatnya, output pelatihan bakery menjadi stagnan dan tidak memiliki daya saing yang kuat di pasar luar. Dalam perspektif teoretis, kondisi ini menggambarkan adanya ketidakseimbangan antara tujuan ideal program dan kapasitas implementasi yang tersedia, atau yang disebut *asymmetric optimization*.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, langkah pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur. Pertama, aspek manajemen program perlu diperkuat melalui sistem kerja kolektif yang terstandarisasi, bukan hanya bergantung pada inisiatif individu petugas. Kedua, peningkatan kompetensi SDM menjadi prioritas dengan

mengembangkan pelatihan dan sertifikasi bagi petugas melalui kerja sama dengan Balai Latihan Kerja atau lembaga pelatihan kejuruan. Ketiga, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis yang konsisten untuk menjamin efisiensi, kualitas, dan akuntabilitas program. Terakhir, pembangunan kemitraan lintas sektor dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil sangat krusial untuk memperluas jejaring distribusi sekaligus menciptakan kepemilikan kolektif terhadap proses reintegrasi sosial. Dengan langkah-langkah ini, program bakery dapat bertransformasi dari sekadar pelatihan keterampilan menjadi instrumen rekonstruksi sosial-ekonomi narapidana yang berkelanjutan dan bermartabat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, program pembinaan kemandirian bakery di Lapas Kelas I Bandar Lampung dapat dipahami sebagai bentuk nyata implementasi sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pemulihan martabat dan kemandirian narapidana. Melalui program Raja Bakery, warga binaan tidak hanya dilibatkan dalam pelatihan keterampilan produksi roti, tetapi juga diarahkan pada pembentukan jiwa wirausaha sebagai bekal utama untuk membangun kemandirian ekonomi setelah bebas. Program ini telah memberi kontribusi signifikan dalam menyiapkan narapidana menghadapi kehidupan pasca-pidana secara produktif dan bermartabat. Dari perspektif teori optimalisasi, program ini telah memenuhi sebagian indikator penting seperti kejelasan tujuan, penerapan asesmen dalam pengambilan keputusan penempatan peserta, serta komunikasi yang partisipatif antara petugas dan warga binaan. Disposisi petugas juga terlihat kuat melalui peran aktif mereka dalam membimbing dan mendampingi kegiatan produksi. Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia yang profesional, minimnya anggaran, dan ketiadaan outlet pemasaran permanen masih menjadi hambatan utama yang membatasi capaian optimal program. Situasi ini menunjukkan bahwa optimalisasi program masih berada pada tahap transisional, belum sepenuhnya mencapai performa ideal.

Lebih jauh, program bakery memiliki peran strategis dalam mendukung reintegrasi sosial narapidana. Kegiatan ini tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga menumbuhkan disiplin, tanggung jawab, serta kepercayaan diri yang menjadi modal penting bagi proses adaptasi sosial. Meski demikian, penguatan kelembagaan melalui penyusunan SOP teknis, peningkatan profesionalitas SDM, serta kemitraan lintas sektor dengan dunia usaha dan masyarakat luas sangat diperlukan untuk membawa program ke tahap yang lebih mapan. Dengan langkah-langkah tersebut, program bakery berpotensi berkembang menjadi model pembinaan kemandirian yang berkelanjutan, berdampak nyata, dan adaptif terhadap tantangan reintegrasi sosial di era kontemporer.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang dapat menjadi rekomendasi strategis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian bakery di Lapas Kelas I Bandar Lampung:

1. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas Bimbingan Kerja. Lapas perlu meningkatkan kapasitas teknis dan pedagogis petugas pembinaan melalui pelatihan rutin, sertifikasi profesi, serta studi banding ke lembaga pelatihan kerja atau industri bakery di luar lapas. Hal ini penting agar pembinaan yang diberikan kepada narapidana memiliki kualitas, relevansi, dan daya saing yang tinggi.

2. Penyusunan dan Implementasi SOP Teknis Program Bakery Dibutuhkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur mulai dari proses seleksi peserta, pelaksanaan pelatihan, manajemen produksi, hingga pemasaran produk. SOP ini akan memberikan arah kerja yang konsisten dan menjadi acuan evaluasi kinerja program.
3. Pembangunan Kemitraan Strategis dengan Dunia Usaha dan Lembaga Eksternal. Lapas perlu membangun kerja sama formal dan berkelanjutan dengan pihak ketiga seperti UMKM, koperasi roti, dinas ketenagakerjaan, dan lembaga pelatihan vokasional. Kolaborasi ini dapat menciptakan sinergi dalam bentuk pelatihan lanjutan, pemagangan, pembukaan jaringan distribusi, serta dukungan promosi produk.
4. Pengadaan Outlet Permanen sebagai Sarana Pemasaran dan Reintegrasi Produk. Diperlukan outlet pemasaran tetap di luar lingkungan lapas yang berfungsi sebagai etalase hasil karya narapidana sekaligus sebagai bentuk konkret keterbukaan pemyarakatan terhadap masyarakat. Hal ini akan memperkuat dimensi reintegrasi sosial serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hasil pembinaan.
5. Pendekatan Komunikasi yang Lebih Adaptif dan Inklusif Petugas perlu mengembangkan pendekatan komunikasi yang lebih adaptif, khususnya dalam menjangkau narapidana baru yang cenderung tertutup atau kurang memahami manfaat program. Pendekatan berbasis mentoring oleh narapidana senior atau alumni program dapat menjadi strategi alternatif yang efektif.

Hasil penelitian ini juga mengandung sejumlah implikasi kebijakan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak-pihak pengambil kebijakan, baik di tingkat institusional maupun nasional:

1. Reorientasi Kebijakan Pembinaan dari Aspek Administratif ke Pendekatan Ekosistem. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa program pembinaan kemandirian seharusnya tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi harus direorientasikan menjadi bagian dari ekosistem sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan pembinaan perlu memasukkan elemen partisipasi publik, pasar tenaga kerja, serta sektor kewirausahaan dalam desainnya.
2. Perumusan Kebijakan Penguatan Kolaborasi Pemyarakatan– Industri. Kementerian IMIPAS melalui Direktorat Jenderal Pemyarakatan dapat menyusun kebijakan nasional terkait pembinaan berbasis industri kerja sama, yang memungkinkan lapas menjalin mitra tetap dengan sektor swasta. Kebijakan ini dapat memuat insentif bagi mitra usaha serta regulasi tentang perlindungan hukum dan etika kerja warga binaan.
3. Integrasi Program Pembinaan ke dalam Skema Pemulihan Sosial Nasional. Hasil pembinaan narapidana seharusnya tidak berakhir saat mereka dibebaskan. Pemerintah daerah dan pusat dapat memasukkan lulusan program pembinaan lapas ke dalam skema program pemulihan sosial seperti BLK, UMKM binaan, atau program padat karya. Hal ini akan memastikan keberlanjutan reintegrasi sosial secara lebih sistemis dan terstruktur.
4. Penetapan Standar Minimum Fasilitas dan SDM Pembinaan Kemandirian di Lapas. Diperlukan kebijakan standar nasional mengenai minimalisasi sarana, prasarana, dan tenaga kerja yang harus dimiliki oleh setiap lapas yang menyelenggarakan pembinaan kemandirian, agar tidak terjadi disparitas mutu antar-UPT dan agar program dapat berjalan optimal secara nasional.
5. Peningkatan Anggaran Program Pembinaan Berbasis Produktivitas. Pemerintah perlu mempertimbangkan peningkatan alokasi anggaran untuk program-program pembinaan yang memiliki orientasi pada produktivitas dan reintegrasi ekonomi, termasuk bakery, hidroponik,

konveksi, dan lainnya. Dukungan fiskal ini penting untuk memastikan keberlanjutan program dan pencapaian target jangka panjang.

DAFTAR REFERENSI

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

- Wicaksono, Luhur. 2023. "Motivasi Dan Kepribadian Dalam Organisasi." 7(2):1527–36. doi: 10.58258/jisip.v7i2.4263/http.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1982). Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. In Allyn and Bacon (Issue 1).
- Citrawan, H., & Zainuddin, D. (2015). Metode Analisis Konflik Dalam Penerapan Regulasi Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan (Conflict-Analytical Method in Implementing Disturbance Prevention Regulation in Correctional Facility). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(1), 1–33.
- Handayani, A., Helmi, & Nofriadi. (2023). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sabang Melalui Sektor Wisata (Studi Kasus Pantai Iboih). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 08(04), 1–10. www.jim.unsyiah.ac.id/Fisip
- Lexy J. Moleong. (2005). Lexy J. Moleong, Metode penelitian kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal 4 47. *Jurnal Penelitian*, 1(juli), 4.
- Maghfiroh, L., & Lewoleba, K. K. (2024). Peran Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Residivis Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Media Hukum Indonesia (MHI). *Media Hukum Indonesia*, 2(2), 204–210.
- Paparang, B. R., Gosal, R., & Kimbal, A. (2014). Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di KAWASAN PERBATASAN (Suatu Studi di Kecamatan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Putri, D., Anggrainy, M. L., Febriyanti, M., & Ludiana, T. (2023). Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membantu Proses Reintegrasi Sosial Narapidana. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 2023, 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Rachmayani, A. N. (2015). Pemberdayaan Warga Binaan melalui Pelatihan Keterampilan Bakery di Rutan Klas I Medaeng Surabaya Akhyarudin. 6.
- Raihan, R., Tasrif, T., & Waluyati, I. (2024). Dampak Psikososial Perilaku Perundungan Siswa di SDN 44 Kota Bima. *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 7(1), 318–326. <https://doi.org/10.33627/es.v7i1.1986>
- Rendy Yoga Pradana, M., Rudy Handoko, V., & Wahyudi, E. (2023). Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukandi Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 3 No.(2797–0469), 130–145.
- Saputra, I. A., Monica, D. R., & Tamza, F. B. (2025). Tantangan dan Strategi Pengembangan Potensi diri Narapidana (Studi Kasus Lapas Kelas 1 Bandar Lampung). 165–172
- Sidik, M. (2002). Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Makalah Disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung, 10(April), 1–14.
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Untari, R., & Choirullah, A. F. (2023). *Jurnal nalar keadilan*. 3(2), 1–21.